

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-1, Bulan Oktober 2021 (tanggal 1 s.d. 7 Oktober)

PANDORA PAPERS DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA

Iwan Hermawan
Peneliti Muda/Kebijakan Ekonomi
iwan.hermawan@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pandora Papers menjadi *wake-up call* bahwa potensi praktik curang dalam berbisnis yang melibatkan negara suaka pajak masih terjadi hingga sekarang. Dua nama menteri koordinator era Pemerintahan Joko Widodo juga ikut tercatat di dalam *Pandora Papers* tersebut. Insentif yang paling dikejar tentu hasil penilaian bahwa pengenaan pajak di Indonesia ditengarai masih relatif tinggi sehingga menstimulasi pengusaha, penguasa, dan 'pesohor' memilih perusahaan 'cangkang' yang sarat *privilege*. Keputusan bisnis tersebut rasional namun dekat dan lekat dengan agenda terselubung untuk melakukan penghindaran pajak, pencucian uang, suap, dan lainnya. Oleh sebab itu, *Pandora Papers* mencuatkan polemik antara keputusan yang lazim dilakukan sebagai aksi strategi bisnis dengan keputusan yang bertujuan mengambil *benefit* lain dari keberadaan perusahaan 'cangkang'. Momentum pandemi Covid-19 menambah eskalasi stigma negatif aktivitas yang berafiliasi dengan perusahaan 'cangkang' tersebut, minimal itu dinilai akan semakin mencederai *sense of crisis* dan menyangsikan kadar nasionalisme saat negara membutuhkan uang lebih banyak untuk kepentingan umum.

Dampak nyata dari potensi aliran gelap uang bagi Indonesia adalah meningkatnya potensi kehilangan pendapatan negara melalui pajak. Berdasarkan hasil kalkulasi penulis, jika pemerintah mampu mencegah aliran tersebut ke luar negeri maka itu akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian sebesar 0,016 persen. Hal yang sama dampak positifnya bagi peningkatan sektor-sektor esensial lainnya yang dibutuhkan saat ini, seperti pendidikan dan kesehatan.

SUMBER

money.kompas.com, 5 Oktober 2021; icij.org, 3 Oktober 2021; ekonomi.bisnis.com, 5 Oktober 2021.